

**LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS
KE PROVINSI SULAWESI UTARA
25 – 28 APRIL 2017**

I.	Dasar Pelaksanaan	:	1	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan-DIPA Nomor MA 002.01.001012.01.51.11.5799.001.001.052A.524111
			2	kegiatan Belanja Perjalanan Biasa Dalam Negeri Tahun Anggaran 2017.
			3	Surat Perintah Tugas dari Kepala Badan Keahlian DPR RI No. BK/00809/SETJEN/PN/01/2017, Tanggal 17 Januari 2017. SPPD No. 01/ST/PKAKN/I/2017 Tanggal 17 Januari 2017, An. <ul style="list-style-type: none"> • Helmizar • Djustiawan Widjaya • Ageng Wardoyo • Sukmalalana • M. Aaqil Imama • Medhia Hartanti • Sindi Meida R. • Mochamad Rizal F. • Syandi Negara • Eri Fareza
II.	Maksud Perjalanan Dinas	:	-	Pengumpulan data serta informasi yang dapat menguatkan kualitas analisis dan kajian sebagai produk PKAKN.
III.	Dinas/Instansi yang dikunjungi	:	-	BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara - BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara - Pemerintah Kota Manado
IV.	Waktu Pelaksanaan	:	-	Dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 25-28 April 2017
V.	Hasil			

BPK Perwakilan Provinsi Maluku

Kunjungan ke BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka pengumpulan data dan informasi melalui observasi dan wawancara terkait dengan kajian yang bertema “*Analisis Pelaksanaan dan Kendala Penerapan SAP Berbasis AkruaI Pada LKPD TA 2015 Serta Persiapan Penerapan SAP Berbasis AkruaI TA 2016*”.

Adapun data dan informasi yang diperoleh adalah sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN KINERJA BPK ATAS EFEKTIVITAS PENERAPAN SAP BERBASIS AKRUAL

Berdasarkan Pemeriksaan Kinerja sampai dengan Semester II Tahun 2015, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan pemeriksaan kinerja untuk menilai kesiapan dan efektivitas upaya pemerintah daerah dalam penerapan SAP berbasis akruaI. Selain itu, atas pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2015, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara juga sudah mulai menilai bagaimana penerapan SAP berbasis akruaI dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Untuk wilayah Provinsi Sulawesi Utara, pemeriksaan kinerja tersebut dilaksanakan pada lima entitas pemerintah daerah yakni Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, dan Kota Tomohon.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan tersebut, terkait dengan pelaksanaan SAP berbasis akruaI pada LKPD untuk pemda yang telah memperoleh opini WTP(12 entitas) tidak terdapat temuan yang signifikan. Sedangkan untuk pemda yang memperoleh opini WDP (4 entitas), terdapat temuan yang signifikan terkait akun aset tetap, yang secara materialitas mempengaruhi kewajaran laporan keuangan, antara lain Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dicatat secara gabungan dan bernilai Rp 1 dan tidak diketahui keberadaanya.

– Kendala penerapan SAP berbasis akruaI di Provinsi Sulawesi Utara diantaranya terkait :

1. Pemerintah provinsi Sulawesi Utara belum memiliki perencanaan memadai dengan dukungan dari DPRD.
2. Kepala Daerah belum mendapatkan pernyataan komitmen dari pimpinan SKPD yang mendukung perencanaan implementasi SAP Berbasis AkruaI
3. Perangkat regulasi dan kebijakan terkait implementasi SAP Berbasis AkruaI belum sepenuhnya mendukung SAP Berbasis AkruaI dan diimplementasikan.
4. Jumlah dan kompetensi SDM pengelola keuangan, aset dan teknologi informasi serta inspektorat selaku pereviu LKPD belum sesuai dengan kebutuhan.
5. Pemda Belum Melakukan Analisis Sistem Aplikasi Yang Dibutuhkan Untuk Implementasi SAP

Berbasis Akrua

- Peranan BPK terkait penerapan SAP berbasis akrua adalah dengan melakukan:
 1. *Peran Koordinatif*, yakni mengkomunikasikan dengan BPKP terkait kelemahan Sistem Manajemen Informasi Daerah (SIMDA), meningkatkan komunikasi audit dengan Kepala Daerah dan jajaran terkait permasalahan yang perlu diperbaiki.
 2. *Peran Konsultatif*, memberikan sosialisasi kepada inspektorat dalam meriviu LKPD, melakukan FGD untuk meningkatkan pemahaman akan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.
 3. *Peran Pemeriksaan*, memberikan rekomendasi perbaikan, meminta Pemda untuk membuat *action plan* terkait rekomendasi tersebut, dan memantau tindaklanjut dan penyelesaian hasil pemeriksaan.

BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

- BPKP memiliki 4 fokus pengawasan yaitu Pengawasan Pembangunan Nasional, Peningkatan ruang fiskal negara, Pengamanan aset negara/daerah, dan Peningkatan tata kelola (*governance system*)
- Pada Tahun Anggaran 2016, 16 Pemda di Provinsi Sulawesi Utara sudah menggunakan SIMDA
- Kendala yang dihadapi terkait dengan penyusunan LKPD berbasis akrua di Provinsi Sulawesi Utara antara lain; Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi yang memadai atas SAP berbasis akrua karena adanya rotasi, Dukungan Pemda sebagai pelaksana keuangan dan Ketersediaan dana untuk melakukan sosialisasi, asistensi dan bimbingan teknis.
- Upaya pendampingan dan pembinaan yang dilakukan oleh BPKP terkait dengan implementasi berbasis akrua dilakukan dengan melakukan sosialisasi, asistensi serta bimbingan teknis terkait penggunaan aplikasi SIMDA. Selain itu, BPKP juga memberikan asistensi/pendampingan terkait penyusunan LKPD berbasis akrua pada pemda pengguna SIMDA. BPKP juga memberikan bimbingan teknis tentang riviu LKPD berbasis akrua kepada Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota.
- Sistem aplikasi yang dikeluarkan oleh BPKP telah dirancang agar dapat dikoneksikan dengan berbagai aplikasi lainnya seperti SIMDA BMD, SIMDA Pendapatan, SIMDA Perencanaan, dan SIMDA Aset pada Pemerintah Kota/Kab, SIMDA Desa dan Siskeudes pada desa dan aplikasi gaji, Taspen, dan Kas Online Pada Bank Sulawesi Utara dan Gorontalo. Namun, pada pelaksanaannya ditemukan sejumlah kendala terkait dengan koneksi internet yang terbatas di daerah kepulauan, dan cepatnya perubahan SIMDA karena adanya perubahan standar.

Pemerintah Kota Manado

- Terkait penerapan SAP berbasis akrua, Pemerintah Kota Manado telah melakukan penerapan SAP berbasis akrua sejak tahun anggaran 2015 sesuai amanat PP 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013. Terkait aspek regulasi, Kepala Daerah telah menyusun peraturan kepala daerah terkait kebijakan akuntansi, sistem dan prosedur yang dibutuhkan dalam penerapan SAP berbasis akrua. Terkait Aspek SDM, Pemerintah Kota Manado telah melakukan bimtek dan sosialisasi kepada pejabat dan staf namun hal ini dinilai masih perlu ditingkatkan lagi. Terkait aspek IT, Pemerintah Kota Manado telah menggunakan SIMDA keuangan, SIMDA BMD dan SIMDA Pendapatan.
- Pemerintah Kota Manado telah memiliki dukungan dalam bentuk anggaran terhadap penerapan SAP berbasis akrua.
- Kendala dalam penerapan SAP berbasis akrua di Pemerintah Kota Manado adalah masih minimnya SDM dari latar belakang Akuntan, sehingga dalam penyusunan dan pengelolaan masih memakan waktu yang lama, dan faktor lain yaitu kebijakan dari pusat yang berubah-ubah seperti kebijakan KJN dan BOS, yang awalnya dikelola oleh provinsi dan sekarang dilimpahkan ke kota/kabupaten.
- Dampak positif yang dirasakan terkait penerapan SAP berbasis akrua antara lain terkait pengelolaan keuangan yang lebih terarah sesuai tata kelola keuangan daerah dan lebih tepat sasaran sehingga Pemerintah Kota Manado mendapatkan opini WTP dari BPK tahun 2014 dan 2015.

Demikian Laporan perjalanan dinas ini dibuat, sebagai bahan Laporan.